

NOMOR SKRIPSI
4834/KOM-D/SD-S1/2021

**UPAYA HUMAS BAWASLU RIAU DALAM IMPLEMENTASI
PERBAWASLU NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

KANNIA MUSTIKAWATI
NIM. 11740324573

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Kannia Mustikawati
NIM : 11740324573
Judul : Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No.10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasai Publik

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021
Dekan,

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
NIP.19811118200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Yantos, S.IP., M.Si
NIP. 19710122200701 1 016

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 196805132005011009

Penguji III

Darmawati, M.I.Kom
NIK.130 417 026

Penguji IV

Mustafa, M.I.Kom
NIK. 130 417 027

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Persetujuan Pembimbing Skripsi

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara:

NAMA : Kannia Mustikawati
NIM : 11740324573
PRODI : Ilmu Komunikasi
JUDUL SKRIPSI : Upaya Humas Bawastu Riau Dalam Implementasi Perbawastu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing

Darmawati, M.I.Kom
NIK. 130 417 026

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dra. Atjih Sukaesi, M.Si
NIP. 19691118199603 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madiri Tempan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Selasa 15 Juni 2021

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi saudara Kannia Mustikawati, NIM: 11740324573 dengan judul “Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik”. Untuk diajukan pada Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiversitas Islam Negrri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing

Darmawati, M.I.Kom
NIK. 130 417 026

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERANYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kannia Mustikawati
 NIM : 11740324573
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 Oktober 1998
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : "Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Mendukung Implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila terbukti ketidakbenaran pada pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru 16 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Kannia Mustikawati
 NIM.11740324573

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Kannia Mustikawati

NIM : 11740324573.

Judul : Upaya Humas Bawaslu Riau dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau tahun, 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada tahun 2019 Bawaslu Riau mendapatkan anugrah sebagai lembaga non structural dengan implementasi keterbukaan informasi public (KIP) terbaik oleh komisi informasi (KI) Pusat. Di awali pada tahun 2015 pada peringkat 8, hingga pada 2019 meningkat hingga posisi terbaik pertama. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. Teori yang digunakan adalah terori 4 peran humas oleh Rosady Ruslan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini bahwa Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik yaitu: 1. *Communicator* adalah peran humas Bawaslu Riau sebagai pemberi pesan atau informasi. 2. *Relationship* merupakan kemampuan humas Bawalu Riau dalam membangun hubungan yang baik terhadap publik internal dan publik eksternal di Bawaslu Riau. 3. *Backup management* diartikan oleh humas bawaslu Riau yaitu tugas yang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh bawaslu Riau. 4. *Good image* maker adalah upaya untuk menciptakan citra baik lembaga Bawaslu Riau Publikasi dilakukan bertujuan untuk membangun citra positif Bawaslu Riau dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang telah dilaksanakan Bawaslu Riau

Kata Kunci: Upaya Humas, Bawaslu Provinsi Riau, Implementasi

ABSTRAC

Name : Kannia Mustikawati

NIM : 11740324573

Title : Riau Bawaslu Public Relations Efforts in Implementing Perbawaslu No. 10 of 2019 concerning Management and Public Information Services. Thesis: Department of Communication, Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University of Sultan Syarif Kasyim Riau in 2021.

This research was motivated in 2019 Bawaslu Riau received the award as a non-structural institution with the best implementation of public information disclosure (KIP) by the Central Information Commission (KI). Starting in 2015 at rank 8, until 2019 it increased to the first best position. Therefore this study aims to find out how Riau Bawaslu's Public Relations Efforts in Implementing Perbawaslu No. 10 of 2019 concerning Management and Public Information Services. The theory used is the theory of 4 roles of public relations by Rosady Ruslan. The research method used is descriptive qualitative. Collecting data using interview, observation, and documentation methods. The results of this study indicate that Riau Bawaslu Public Relations Efforts in the Implementation of Perbawaslu No. 10 of 2019 concerning Management and Public Information Services, namely: 1. Communicator is the role of PR Bawaslu Riau as a message or information giver. 2 Relationship is the ability of Bawalu Riau public relations in building good relations with the internal public and the external public in Bawaslu Riau. 3. Backup management is defined by the PR of Bawaslu Riau, namely tasks carried out as a form of support for activities carried out by Riau Bawaslu. 4. Good image maker is an effort to create a good image of the Riau Bawaslu institution. Publication is aimed at building a positive image of Bawaslu Riau and building public trust in the performance that has been implemented by Bawaslu Riau

Keywords: *Public Relations Efforts, Bawaslu Riau Province, Implementation*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kedahirat Allah Subhanahuata'ala atas segala kelimpahan rahmat dan karunianya, sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan suri tauladan bagi umat islam sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.”**. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit jasa, sumbangan yang penulis terima dari berbagai pihak, Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis, secara moral dan moril dalam penyelesaian skripsi ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada Teristimewa dan penuh cinta serta kasih sayang kepada kedua orang tua, Ayahanda Budiono, Ibunda Yuliani, yang telah menyemangati, memberi dukungan, doa, nasehat dan segalanya demi Ananda dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu ini

Dan penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Uinversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau Bapak Prof. Dr.Khairunnas, M.Ag, dan Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag , Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.pt, M.Sc., Ph.D.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan Bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak DR. Drs. Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M. selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos, M.Si, Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi
4. Ibu Darmawati, M.I.Kom Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia membimbing dan telah banyak memberi masukan serta saran selama penulisan skripsi, semoga ilmu yang telah ibu berikan menuai banyak keberkahan.
5. Bapak Yantos M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Segenap Ibu/Bapak Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terimakasih telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah Ibu/Bapak berikan menuai banyak keberkahan.
7. Bapak Rusidi Rusdan, S.Ag M.Pd.I, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau yang telah mengizinkan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai langsung terkait penelitian ini.
8. Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd, M.M selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Datin, Ibu Dona Donara S.E, Selaku Kabag Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai secara langsung untuk penelitian ini.
9. Adik-adik tersayang Adel Gustinigo, Mahbub Fauzan, Bilqis Callista yang selalu mendukung dan dan mendoakan penulis dalam Menempuh jenjang Pendidikan Strata satu ini.
10. Abang sekaligus pacar Vizra Dwi Yanri yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan ini
11. Teman temanku, Reska Riolpa, Ananda Suci Lestari, Yenny Novita, Dwi Novridha Amalia, Fara Dewi Andini, Dwi Dara Fahresi, Lydia Latifah, Kartika Putri Sari, Hesti Wulan Pratami
12. Peliharaan comel ku, Ujuu, Eyyee, dan Xtrail beserta anak2nya yang selalu baik dan menghibur disaat lagi galau

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kelapangan hati, penulis menerima kritikan serta saran yang membangun dari berbagai pihak, agar penelitian ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

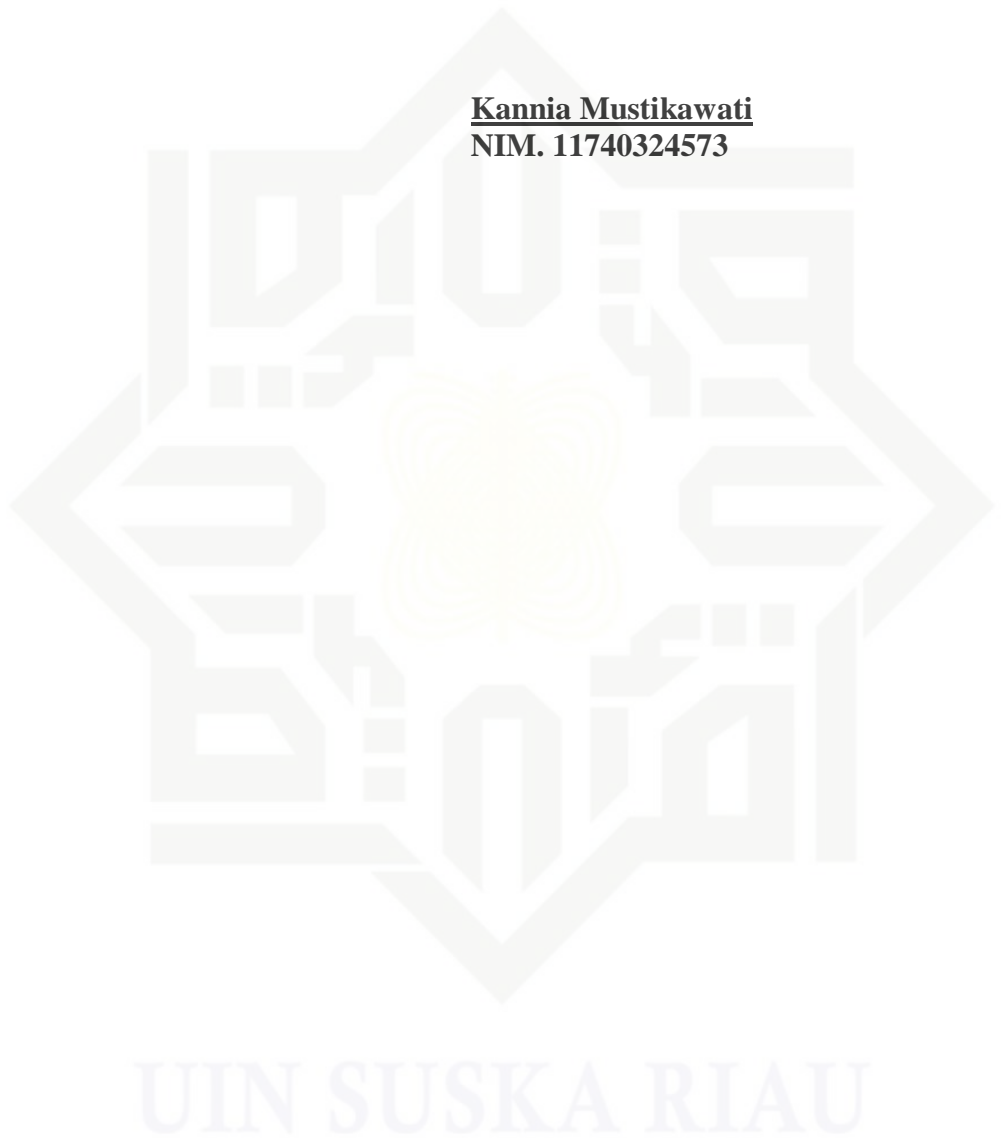
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi para akademisi terkait keilmuan yang sama, serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Pekanbaru Maret 2021

Penulis

Kannia Mustikawati
NIM. 11740324573



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Penegasan Istilah	3
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.5. Kegunaan Praktis dan Teoritis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori	9
2.3. Konsep Operasional.....	21
2.4. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3. Sumber Data Penelitian	25
3.4. Informan Penelitian	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data	26
3.6. Validitas Data	27
3.7. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
4.1. Sejarah Bawaslu Provinsi Riau.....	30
4.2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Riau	34
4.3. Visi dan Misi Bawaslu Riau tahun 2019 – 2024	38
4.4. Logo Bawaslu Riau	38
4.5. Perbawaslu No.10 Tahun 2019.....	39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian.....	40
5.2. Pembahasan	55

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	62
6.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Logo Bawaslu Riau	38
Gambar 5.1 : Instagram Bawaslu Riau	45
Gambar 5.2 : Website Resmi Bawaslu Riau	45
Gambar 5.3 : Facebook Bawaslu Riau	46
Gambar 5.4 : Youtube Bawaslu Riau.....	46
Gambar 5.5 : Contoh Media Koran Bawaslu Riau	47
Gambar 5.6 : Talkshow TV Lokal	47
Gambar 5.7 : Kegiatan Bimtek Media	50
Gambar 5.8 : Rapat Evaluasi.....	52
Gambar 5.9 : Kegiatan Sosialisasi PPID	58
Gambar 5.10 : Wartawan sahabat Bawaslu.....	59
Gambar 5.11: Publikasi Kegiatan Bawaslu Riau	61
Gambar 5.12 Publikasi Bawaslu Riau pada media online	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Kerangka Pemikiran	23
Tabel 3.1 : Informan Penelitian	26
Tabel 5.1 : Daftar nama Informan Penelitian	41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Secara khusus kehadiran UU KIP adalah untuk memberikan ruang kepada setiap badan publik dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai upaya meningkatkan atau memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.¹

Salah satu syarat dalam melaksanakan UU KIP ini adalah melalui dibentuknya sebuah unit kerja dalam badan publik yang dapat digunakan sebagai “media” untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pembuatan website, call center, dan lain sebagainya. PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab (good governance). karena esensi dari keterbukaan informasi publik menuntut penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik melalui peran aktif dari masyarakat sebagai sarana optimal dalam penerapan pengawasan publik demi terselenggaranya negara yang lebih baik.

Bawaslu Riau merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada seluruh wilayah Provinsi Riau,

¹ Ndoheba Khenda Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No.3, Desember 2015: 165-186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai lembaga pengawasan Bawaslu berkewajiban atas pemenuhan hak atas informasi dari Bawaslu Riau kepada masyarakat Riau dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu atau pilkada diwilayah Riau, Bawaslu Riau dalam menjalankan tugas , wewenang dan kewajiban, tidak saja untuk terus melakukan *upgrade* pemahaman pengawasan dan pemilu, penguasaan regulasi juga berkomitmen membangun koordinasi dan kerja sama baik internal (jajaran pengawas pemilu) maupun eksternal (*stakeholders*). koordinasi dan kerja sama yang di lakukan tidak saja dalam rangka optimalisasi pengawasan tetapi juga mendorong pengawasan partisipatif.²

Secara Dejure PPID Bawaslu Riau diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola informasi public, mengkoordinir, mendokumentasikan informasi serta menyusun Informasi untuk Publik. Penetapan PPID Bawaslu Riau berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Republik Indonesia (RI) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota.³

PPID Bawaslu Riau dikelola oleh divisi Hukum, Humas dan Datin dan menjadi tanggung jawab Humas, Humas Bawaslu Riau sangat berperan dalam mengimplementasikan Perbawaslu No 10 Tahun 2019 ini kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang berjumlah 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Peran Humas Bawaslu Riau dalam mendukung implementasi Perbawaslu no 10 Tahun 2019 terlihat dari pelaksanaan Pelayanan PPID, dalam menyusun Daftar informasi Publik (DIP) dan pengelolaan tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Humas merupakan jembatan penghubung antara instansi dengan publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Humas tidak dapat dipisahkan dengan publiknya, humas menjalin hubungan dengan publik internal dan eksternal. Menariknya pada tahun 2019 Bawaslu Riau mendapatkan anugrah

² Eddy Syarifuddin, *Dinamika Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Bumi Lancang Kuning*, (Pekanbaru, 2014), hlm.2.

³ Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) No 10 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai lembaga non structural dengan implementasi keterbukaan informasi public (KIP) terbaik oleh komisi informasi (KI) Pusat. Diawali pada tahun 2015 pada peringkat 8, hingga pada 2019 meningkat hingga posisi terbaik pertama.

Peran humas sangat penting bagi Bawaslu Riau sehingga perlu ditelaah lagi mengenai upaya humas di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public, keberhasilan Bawaslu Riau mendapat penghargaan sebagai lembaga non structural dengan implementasi keterbukaan informasi terbaik pertama tahun 2019 dikarenakan kriteria penelitian salah satunya yaitu melihat kinerja Humas pada lembaga tersebut.

Sehingga Bawaslu Riau meraih anugrah Keterbukaan informasi public terbaik pertama tahun 2019. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Judul Penelitian: **“Upaya Humas Bawaslu Riau dalam implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik”**

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam kata judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya adalah sebuah usaha ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁴

2. Humas

Humas merupakan fungsi dari manajemen yang mengevaluasi opini, sikap dan perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur suatu individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik, dan merencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memperoleh pengertian dan dukungan dari publik.⁵

⁴ Badudu JS dan Zain, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 686. hlm 3

⁵ Frazier H More, Humas Membangun Citra dengan Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 6

3. Bawaslu Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pilkada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.⁶

4. Implementasi

Implementasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis dikemukakan maka Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Mendukung Implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Mendukung Implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

⁶ Wikipedia, dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum (diakses pada 6 Oktober 2020)

1.5

Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat mengetahui gambaran penerapan teori teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan penerapannya.
- b. Menambah pengalaman mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
- c. Menambah ilmu yang tidak diperoleh dilembaga pendidikan

2. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau

- a. Merupakan salah satu evaluasi dari pencapaian materi yang telah dikuasai mahasiswa.
- b. Memperoleh informasi dari Bawaslu Riau mengenai lapangan pekerjaan dan informasi lainnya.

1.6

Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian lanjutan bagi peneliti atau pihak lain.
2. Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang didapat di lapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Suntuk bahan pertimbangan dalam penelitian serta untuk menghindari duplikasi design dan temuan dalam penelitian maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan design penelitian yang baik sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan penelitian yang relavan dengan penelitian penulis:

Penelitian yang dilakukan Sri Astuty tahun 2017 dengan judul **ANALISIS FUNGSI DAN PERAN HUMAS DALAM UPAYA IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)**". perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terkait objek penelitian dan latar belakang penelitian.

Hasil penelitian:⁷

1. Dalam implementasi good governance Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin masih terbatas pada menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi. Hal ini berkaitan dengan Keterbatasan peran yang diberikan oleh pimpinan juga berpengaruh bagi bagian humas Sekretariat Kota Banjarmasin untuk menjalankan fungsi public relations dengan baik.
2. Praktisi humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin kebanyakan adalah mereka yang tidak berlatar pendidikan ilmu komunikasi. Sarjana ekonomi, hukum, sosial politik mengemban tugas humas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan penambahan wawasan tentang hubungan masyarakat melalui pelatihanpelatihan kehumasan serta

⁷ Sri Astuty, "Analisis Fungsi dan Peran Humas dalam Upaya Implementasi Good Governance (Studi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)" (Universitas Lambung Mangkurat, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari literatur kehumasan dan tentunya harus diimplementasikan secara nyata.

Selanjutnya penelitian dengan Judul **“Peran Humas Pemda Dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto)”** perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada teori yang digunakan, objek kajian dan lokasi penelitian.

Hasil penelitian:⁸

1. Strategi humas yang digunakan dalam mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu adanya kerjasama dari pihak media massa maupun dari pihak instansi lainnya yang terkait, kedisiplinan pegawai humas dalam menjalankan program-program yang telah dirancang, pelaksanaan program kerja urusan wajib pada bagian humas sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat pada table realisasi keuangan yang mencapai 96,62%. secara fisik pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik dan optimal serta memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan, hal ini tercermin dari pencapaian sasaran.
 2. Hambatan yang dihadapi humas pemda dalam mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yakni sarana Transportasi, secara umum tidak ada ditemukan permasalahan pada bagian humas Sekretariat Kabupaten Jeneponto yang sangat aman detail, cuma ada beberapa sarana dan prasarana yang harus diupayakan untuk peningkatan dan penambahan, agar dapat mengantisipasi kendala dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pada bagian humas setda Kabupaten Jeneponto
- Penelitian yang dilakukan oleh Amilia Utami Lubis tahun .2018. dengan judul **“Upaya Humas Pt Pupuk Iskandar Muda (Pim) Dalam Menangani Penanggulangan Efek Limbah Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat Kecamatan Dewantar”**. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan lokasi penelitian.

⁸ Soridin S, “Peran Humas Pemda Dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto)” (Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Hasil penelitian⁹:

1. Peran fasilitator komunikasi pada Biro Humas tidak maksimal, ketidaktersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik menjadi penyebab tidak maksimalnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya. Informasi pemerintahan yang seharusnya dapat diakses pada website maupun media sosial yang telah tersedia tidak berjalan maksimal, begitu juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang perannya dipegang oleh Biro Humas, informasi yang seharusnya dapat diakses melalui website, tidak tersedia. Ini berkebalikan dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fungsinya hanya PPID Pembantu, tetapi mereka telah siap memberikan informasi ke publik melalui website yang dikelola.
2. Humas PT Pupuk Iskandar Muda menjalin hubungan baik dengan masyarakat Kecamatan Dewantara adalah dengan melakukan sosialisasi rutin membahas bagaimana pertolongan pertama pencegahan paparan ammonia serta membahas kegiatan perusahaan, terutama menjalin hubungan baik dengan kepala lingkungan masyarakat untuk mendiskusikan keluhan masyarakat setempat, serta memberi bantuan dan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat Kecamatan Dewantara yang membutuhkan.
3. Selain membina hubungan baik dengan masyarakat, Humas PT Pupuk Iskandar Muda juga menjalin hubungan baik dengan pihak media massa agar media massa dapat mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perusahaan serta memberikan edukasi kepada para jurnalis tentang bagaimana proses industri berjalan, apa yang menyebabkan gas ammonia bocor dan upaya mengenai pengangulungannya, agar media tidak memberikan informasi yang salah mengenai PT Pupuk Iskandar Muda dan merugikan perusahaan.

⁹ Amilia Utami Lubis "Upaya Humas Pt Pupuk Iskandar Muda (Pim) Dalam Menangani Pengangulungan Efek Limbah Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat Kecamatan Dewantara, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

Kajian teori untuk memaparkan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teori merupakan proposisi yang memberikan penjelasan atau suatu gejala. Teori memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Biasanya, walaupun tidak selalu, teori merupakan rumus yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dengan teori menyatakan sebab akibat, dapat dibuat ramalan atas terjadinya suatu gejala.¹⁰

1. Upaya

Menurut Tim Penyusun Departmen Pendidikan Nasional upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹

2. Humas

a. Pengertian Humas

Humas merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap dan perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur-prosedur suatu individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik, dan merencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik¹².

Humas adalah merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Humas membantu suatu instansi dan publiknya untuk selalu beradaptasi secara

¹⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 6.

¹¹ Morissan, *Manajemen Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm 178

¹² Frazier H. More, *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan. Humas adalah upaya organisasi untuk memperoleh kerja sama dari sekelompok orang atau masyarakat. .Humas membantu organisasi berinteraksi secara efektif dan berkomunikasi dengan publik utama. Humas adalah proses yang akan berkelanjutan dari usaha usaha manajemen untuk memperoleh itikad baik dan pengertian dari langganannya, pegawai dan publik umumnya kedalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri,keluar dengan mengadakan pertanyaan pertanyaan.¹³

Moore mendefinisikan humas sebagai “Hubungan dengan masyarakat luas, sepeti melalui publisitas;khususnya fungsifungsi korporasi, organisasi dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenngkan untuk dirinya sendiri”. Humas lembaga pemerintah, yakni “merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat.”¹⁴

Menurut Frida Kusumastuti humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, bagian humas diinstitusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasisecara teratur tentang kebijakan, rencanarencana serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintah dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi

¹³ Uchjana, Onong, Humas Relations dan Public Relations,(Bandung:Mandar Maju, 2004) hlm24.

¹⁴ Rahmadi F, dalam Public Relations Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1992), hlm 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.¹⁵

Menurut Frank jenfkins humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun ke luar antar suatu organisasi dengan semua khalayak nya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian saja, melainkan ada tujuan khusus seperti penanggulangan maslaah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu, misalknya mengubah sikap yang negatif menjadi positif.¹⁶

Menurut Profesor Edward L. Bernays mengatakan bahwa Hubungan Masyarakat mempunyai tiga pengertian :¹⁷

- 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- 2) Membujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan,
- 3) Usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan kita dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan kita.

Jadi dapat disimpulkan humas merupakan sebagai jembatan penghubung antara instansi dengan masyarakat. Didalam aktivitas humas tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran informasi yang dilakukan untuk masyarakat maupun untuk publik internal dari instansi. Dengan adanya humas dapat membantu instansi mencapai tujuan.

b. Tujuan Humas

Menurut Stainberg tujuan Humas adalah untuk menciptakan publik yang favourable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Empat orang ahli lainnya yakni

¹⁵ Frida Kusumastuti, *Dasar-dasar Humas* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 37.

¹⁶ Frank Jefkins, *dalam Public Relations* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm 10.

¹⁷ Suryosubroto B, *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat* (School Public Relations) (Jakarta: Rieneka Cipta, 2012), hlm 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marshall etal dalam public administration merumuskan tujuan Humas sebagai berikut:¹⁸

- 1) Secara Positif, yaitu berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi atau badan.
- 2) Secara Defnitife , yaitu berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat yang bernada negatif bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar.

selanjutnya menurut Kusumastutia adalah tujuan humas adalah terjaga dan terbentuknya kognisi,afeksi dan prilaku positif publik terhadap organisasi atau lembaga. Dengan demikian,rumusan yang paling tepat mengenai tujuan Humas adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi)
- 2) Menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi)
- 3) Memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek psikomotoris).

Mengacu pada beberapa tujuan diatas,dapat dikatakan bahwa setelah pengetahuan/pikiran dibuka,emosi/kepercayaan disentuh maka selanjutnya perilaku positif dapat diraih.Pada akhirnya,semua itu kembali pada tujuan yang lebih besar,yakni terbentuknya citra yang positif terhadap organisasi lembaga dimana humas berada.

c. Tugas dan Fungsi Humas

- 1) Tugas Humas

Tugas humas adalah bagaimana merencanakan , mewujudkan dan memelihara relasi yang baik secara terus menerus dengan semua pihak yang telah disebutkan diatas itu secara efektif dan berhasil mendapatkan keuntungan atas bentuk-bentuk relasi itu.²⁰

¹⁸ 1 Ruslan,Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2003) hlm 20-21

¹⁹ Kusumastuti. *Dasar Dasar Humas*.(Jakarta:Ghaila Indonesia,2002) hlm 4

²⁰ Anggoro, M.L. *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut kusumastuti ada tiga tugas humas dalam organisasi/ lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas, ketiga tujuan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi/ lembaga.
- 2) Mempertemukan kepentingan organisasi/ lembaga dengan kepentingan publik.
- 3) Mengevaluasi program-program organisasi/ lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik.

Sutanto mengutip pendapat Cutlip and Center dalam Kusumastuti menyatakan tugas Humas perusahaan adalah sebagai berikut:²²

- 1) Mendidik melalui kegiatan nonprofit suatu publik untuk menggunakan barang/jasa instansinya.
- 2) Mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan public
- 3) Meningkatkan penjualan barang/jasa
- 4) Meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari
- 5) Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- 6) Mencegah pergeseran penggunaan barang dan jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen.

1) Fungsi Humas

Effendy mengutip Bertrand R. Crandfield menyebut fungsi humas adalah sebagai berikut:²³

²¹ Kusumastuti. Dasar Dasar Humas. (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002) hlm 8

²² ibid, hlm hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengabdikan kepada kepentingan umum.
- b) Memelihara komunikasi yang baik.
- c) Menekankan pada moral dan perilaku yang baik.

Menurut Cutlip and Center yang dikutip oleh Kusumastuti, fungsi humas meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi
- b) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan
- c) Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum
- d) Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama humas adalah memberikan nilai yang positif bagi suatu perusahaan, membangun relasi yang baik antar organisasi dan publiknya baik intern maupun ekstern. Publik yang intern adalah publik yang berada dalam organisasi tersebut, seperti pegawai, pemimpin dan sebagainya. Sedangkan Publik ekstern adalah Publik yang berada diluar organisasi yaitu masyarakat, pemerintah dan lain lain.

d. Sasaran Kegiatan Humas

Sasaran humas adalah publik, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Dalam praktik publik ini dikelompokkan menjadi dua, yakni:²⁵

²³ Emha dan Meylia, "Membangun Citra SMK Melalui Peran dan Strategi Humas (Studi SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto)," Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP) Vol. 2, No. 2 (2014): 24, 21

²⁴ Kusumastuti, Dasar Dasar Humas. (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2002) hlm 24

²⁵ Rosady Ruslan, PR dan Komunikasi metode penelitian, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006) hlm 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Publik internal meliputi publik karyawan, yakni mereka yang bekerja dalam organisasi/lembaga dengan karakteristik kepentingan berupa kesejahteraan (penghasilan), promosi jabatan atau penghargaan prestasi kerja, publik pemegang saham yang memiliki karakteristik kepentingan investasi yang aman, terjaganya aset; publik pengelola, yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kinerja organisasi/lembaga.
- 2) Publik eksternal, pada prinsipnya publik ini berada diluar organisasi/lembaga publik eksternal misalnya komunitas lokal (tetangga) yang memiliki karakteristik kepentingan, rasa aman, rasa bangga, keindahan dan kesehatan lingkungan, kesempatan kerja, penambahan penghasilan, publik pers yang memiliki kepentingan terhadap peristiwa-peistiwa yang memiliki kepentingan terhadap mitra pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pemasukan pajak, penerapan tenaga kerja dan sebagainya.

Dari pernyataan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa sasaran kegiatan humas ada 2 macam publik yang menjadi sasaran, yaitu publik intern dan publik eksternal, publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari suatu perusahaan atau instansi itu sendiri seperti karyawan yang bekerja serta pejabat pengambil keputusan didalam industri. Sedangkan Publik eksternal adalah orang luar atau publik umum (masyarakat) dimana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau informasi demi timbulnya goodwill dari mereka.

e. Upaya humas

Humas sesungguhnya sebagai alat manajemen modern secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi, artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut atau bersifat melekat pada manajemen perusahaan. Hal tersebut menjadikan humas dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidak visi, misi dan tujuan bersama dari organisasi atau lembaga tersebut.²⁶

Peranan umum humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan yaitu :

- 1) Mengevaluasi sikap atau opini publik
- 2) Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan kepentingan publiknya
- 3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktivitas humas.

Rosady Ruslan menjelaskan secara rinci empat peran utama humas adalah sebagai berikut:²⁷

1) *Communicator*

Artinya kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan sekaligus persuador.

2) *Relationship*

Kemampuan peran humas dalam membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Dan juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak.

3) *Backup Management*

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.

²⁶ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Bandung: Raja Grafindo Persada: 2012) hlm 24.

²⁷ Ibid, Hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Good Image Maker*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relations dalam melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra dan nama baik lembaga/organisasi dan produk diwakilinya.

Jadi ada empat yang menjadi peran humas, dimana disetiap peran memiliki saling terhubung, humas sebagai communicator yaitu humas sebagai jembatan penghubung antara instansi dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal dengan cara melakukan komunikasi. Sebagai relationship yaitu humas membentuk kerjasama dengan pihak ekstern maupun intern untuk mempermudah pekerjaan dengan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai back up manajemen yaitu humas melaksanakan fungsi manajemen untuk mempermudah mencapai tujuan instansi. Good image maker yaitu humas mampu membentuk citra instansi dimata masyarakat.

f. Media Humas

Media merupakan sesuatu yang terpenting bagi humas untuk mempublisk seluruh kegiatan agar masyarakat tau apa yang akan dan sudah dilaksanakan oleh humas. Menurut Jefkins menjelaskan terdapat beberapa jenis-jenis media humas diantaranya:²⁸

1) Media pres (press)

Media yang terdiri dari media cetak yaitu koran, majalah, buku petunjuk khusus, buku-buku tahunan dan laporan tahunan yang diterbitkan secara umum.

2) Audio-visual

Media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau biasa juga gabungan film-film dokumenter.

²⁸ Frank Jefkins, Public Relations edisi kelima terj Drs.Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Radio

Jenis ini meliputi semua jenis radio lokal, nasional maupun international yang dipancarkan secara luas.

4) Televisi

Penyebaran informasi dapat melalui televisi nasional maupun regional dan juga televisi internasional serta sistem-sistem teletext.

5) Pameran (exhibiton)

Humas dapat memanfaatkan pameran yang diadakan di suatu tempat untuk memperkenalkan produk.

6) Bahan-bahan cetakan (printed material)

Yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informative dan menghibur yang disebarkan dalam berbagai bentuk guna mencapai tujuan humas.

7) Penerbitan buku khusus (sponsored books).

Isi buku ini bisa bermacam-macam, misalnya saja mengenai selukseluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai penggunaan produkproduknya atau bisa juga keterangan tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan produk atau organisasi itu sendiri.

8) Surat Langsung (direct mail)

Media ini digunakan sebagai alat penyampai pesan ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, tapi juga kepada berbagai macam lembaga yang sekiranya relevan, atau untuk dipajang di tempat umum.

9) Pesan-pesan lisan (spoken word)

Kegiatan seperti ini bisa dilangsungkan dalam berbagai kesempatan seperti dalam acara sarapan pagi bersama, di sela-sela pertemuan Dinas, dalam pembicaraan telepon, atau dalam suatu seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Pemberian sponsor (sponsorship)

Kegiatan sponsorship ini dilakukan untuk mendukung suatu iklan atau usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor terkandung elemen humas, karena terdapat niat baik organisasi yang memberikannya.

g. Humas Pemerintahan

Menurut Rosady Rusloan, fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut :

- 1) Pertama Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya.
- 2) Kedua memberikan pelayanan, menyebar luaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan secara nasional maupun daerah kepada masyarakat.
- 3) Ketiga menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publikserta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.

Berperan serta secara aktif untuk menciptakan iklim yang kondusif, dinamis demi untuk mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara taktis dalam jangka pendek, humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif.

Secara umum dalam jangka panjang, humas instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga yang bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat.

Peranan humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua faktor dasar, pertama, masyarakat mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat, kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi demikianlah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.²⁹

h. Implementasi

Implementasi atau penerapan dari suatu kebijakan merupakan suatu kegiatan penting dari keseluruhan dalam proses suatu kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan kemudian diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. James P. Lester dan Joseph Steward berpendapat bahwa implementasi kebijakan dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan agar meraih dampak dan tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Patton dan Sawicki menjelaskan lebih lanjut dari atau tentang konsep implementasi, Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, yang dimana pada posisi ini eksekutif mengatur bagaimana cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan serta menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dapat mengorganisir, seorang yang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk

²⁹ Sulistyoningih, "Strategi Humas Dan Protokol terhadap Publikasi Kegiatan DPRD DIY," Jurnal Kom, Vol 10, No. 1, (April 2017): hlm 119

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang akan memberikan penjelasan terhadap Upaya Humas Bawaslu Riau dalam Mendukung Implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 **Upaya Humas Bawaslu Riau dalam Mendukung Implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik:**

1. *Communicator*

Humas Bawaslu Riau sebagai komunikator diharapkan memiliki kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak Koran, media sosial seperti website, Instagram, facebook, dan Youtube maupun media elektronik seperti talkshow di stasiun Tv Lokal. Humas dalam hal ini bertindak sebagai mediator dan persuator. Humas menjadi mediator bagi instansi Bawaslu Riau dalam mendukung Implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.

2. *Relationship*

Relationship adalah kemampuan humas Bawaslu Riau dalam membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya

³⁰ Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Jakarta: Lukman Offset, 2003), hlm 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan publik internal maupun eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan kerja sama dan toleransi keduabelah pihak. Public internal meliputi seluruh karyawan Bawaslu Riau, sedangkan public eksternal yaitu Bawaslu tingkat Kabupaten/ Kota, Peserta Pemilu, Partai Politik, Stakeholder, dan Masyarakat Riau

3. *Backup Managemant*

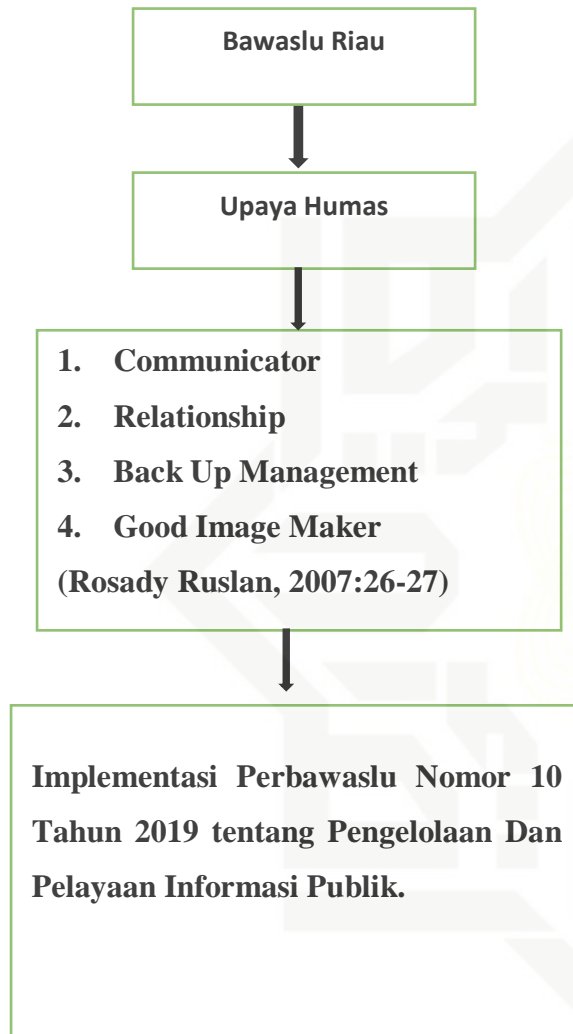
Dalam hal ini praktisi Humas Bawaslu Riau ditugaskan untuk melaksanakan dukungan atau penunjang kegiatan lain seperti Kegiatan Rapat Kordinasi, Rapat Kerja, Diskusi Publik dan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka pokok tujuan Organisasi. Rapat kordinasi dilaksanakan bersama bawaslu tingkat Kabupaten/Kota se-Riau dilaksanakan pada awal dari setiap program tertentu/khusus, rapat kerja dilaksanakan di setiap divisi maupun dalam satu kesatuan di Bawaslu Riau, dan diskusi public dilaksanakan untuk mengkampanyekan pemilu LUBERJURDIL, tolak Money politik, dan mensosialisasikan seputar tahapan pemilu dan pidana terhadap pelanggaran pemilu.

4. *Good Image Marker*

Dalam hal ini humas Bawaslu Riau dituntut untuk mampu menciptakan citra yang baik untuk instansi kepada publiknya guna mendapatkan citra yang diharapkan. Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai humas. Citra itu bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Untuk mendapat citra yang baik, Humas Bawaslu Riau menyusun skala Prioritas guna menentukan program program yang yang dianggap berguna untuk menaikkan citra, seperti mengupayakan publikasi media dengan seluas luasnya, dan melaksanakan diskusi public dengan stakeholder, mahasiswa dan masyarakat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh kerangka pikir :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja(sistematis) untuk memahami suatu objek, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁸ Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data³¹.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menggambarkan, menjelaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.³²

John W.Creswell dalam Hamid Patilima mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada pnciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah³³.

Tahapan awal peneliti lakukan yaitu observasi lapangan melihat fenomena yang terjadi lembaga bawaslu Riau, selanjutnya peneliti melakukan pra riset mengumpulkan referensi teori berdasarkan fenomena lapangan, dan terakhir peneliti melakukan tahapan riset dengan wawancara dan mengumpulkan data, dokumentasi tentang fenomena yang terjadi di Bawaslu Riau

³¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 4

³² ³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), hlm 105.

³³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 3.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Riau, Jln Adi Sucipto, Kota Pekanbaru, Riau sejak Desember 2020 hingga Februari 2021.

3.3 Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli peneliti (langsung dan informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.³⁴ Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Nara Sumber Bawaslu Provinsi Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, data diambil dari sumber asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.³⁵ Data Sekunder dari penelitian ini adalah Dokumentasi Bawaslu Riau, Jurnal, Koran, Website resmi Bawaslu Riau dan Buku.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini, maka informan dapat dikatakan sama dengan orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penentuan informan penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁶ Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua

³⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm 86.

³⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2016), 85.

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Maka dari itu peneliti memilih secara sengaja informan penelitian tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Alasan peneliti menjadikan tiga orang ini menjadi informan dikarenakan mereka pembuat kebijakan Humas, Pelaksanaan Humas, dan orang yang bertanggung jawab terhadap PPID Humas Bawaslu Riau

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Rusidi Rusdan S.Ag, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Riau
2	Amiruddin Sijaya S.Pd., M.M	Divisi Hukum, Humas, dan Datin
3	Dona Donara S.E	Kabag Hukum, Humas, dan Datin

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada informan yang berkaitan terhadap penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode yang digunakan guna mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kegiatan, program kerja, anggaran dasar rumah tangga, serta dokumen penting lainnya.³⁸ Dokumen dikumpulkan dari peninggalan tertulis seperti buku-buku, tentang Public Relation, dan yang berhubungan dengan penelitian.

³⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11.

³⁸ Ibid, hlm 11.

3. Observasi

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui bagaimana tentang kegiatan Peran Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.³⁹

3.6 Validitas Data

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.⁴⁰ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal) dan *confirmability* (obyektoivitas). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang harus dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya Miles dan Huberman dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).⁴²

³⁹ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 10*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm 91.

⁴⁰ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm 162.

⁴¹ Ibid, hlm 200.

⁴² Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta, hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui.

Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (direduksi) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin

Merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti⁴³.

⁴³ Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, hlm. 104.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Bawaslu Riau

1. Pembentukan Bawaslu Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dibentuk setelah adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 69 undang-undang ini, menyebutkan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Pada pasal 73 ayat (4) huruf d memberi kewenangan kepada Bawaslu Reublik Indonesia untuk membentuk Bawaslu tingkat Provinsi. Selanjutnya posisi Bawaslu Provinsi merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945.⁴⁴

Bawaslu Riau dalah sebuah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi Riau. Anggota Bawaslu Riau terdiri dari individu yang memiliki kemampuan dalam pengawasan Pemilu dan pilkada, serta tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu Provinsi Ria dibantu Sekretariat yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 yaitu Sekretariat Bawaslu tingkat Provinsi memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi .

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang terdiri atas 3 Sub bagian, yait Sub bagian Administrasi, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan Sub bagian Hukum, Humas dan Hubungan antar lembaga.

Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang terpilih ditetapkan dengan dengan dasar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-

⁴⁴ Andis susilawan Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau*, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016), hlm.1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kep tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.⁴⁵

2. Awal Terbentuknya Bawaslu Riau

Anggota Bawaslu Provinsi Riau generasi awal periode 2012-2017, yaitu Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si dan Rusdi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I. Dengan bermodalkan surat keputusan (SK) dan surat edaran (SE) dari Bawaslu, tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Riau Menghadap Gubernur Riau, Rusli Zaenal.

Rangkaian proses seleksi yang harus dilalui untuk bisa menjadi anggota Bawaslu Provinsi Riau cukup panjang dan tidak mudah. Diawali dari penelitian administrasi bakal calon; seleksi tertulis; tes kesehatan; tes psikologi; wawancara sampai uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Semua rangkaian ini butuh keseriusan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Belum lagi Tim seleksi yang bertugas menyaring calon anggota Bawaslu Provinsi Riau yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan profesional yang sudah teruji integritas dan independensinya.

Tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Riau di ketuai oleh Prof. Dr. H. Sudirman M.Johan, MA, sekretaris, Baidarus, MM., M.Ag, dan anggota, Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH M.Hum, Drs. H. Levna Eryan, M.M, dan Drs. H. Safri Yus.

Beratnya seleksi untuk mengikuti tes sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Riau ini, dapat diketahui dari pengalaman anggota Bawaslu Provinsi Riau yang merupakan aktor utama dalam buku sejarah Bawaslu Provinsi Riau ini, mulai dari awal seleksi sampai dilantik dan melaksanakan tugas sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau.

Pada tanggal 5 s.d 11 Agustus 2012 Tim seleksi membuka pendaftaran calon anggota badan pengawas pemilihan umum provinsi Riau periode 2012-2017, selama 7 (tujuh) hari pembukaan pendaftaran, terjaring

⁴⁵ Ibid. Hlm 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

70 pelamar mengambil formulir. Dan hanya 48 pelamar yang mengembalikan formulir ke Sekretariat Tim Seleksi.

Kemudian pada tanggal 14 agustus 2012 Hasil seleksi administrasi diumumkan, terdapat 32 pelamar yang lulus seleksi administrasi, Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya menjalani tahap tes tertulis, tahapan tes kesehatan dan tahapan tes psikologi. Dari 48 pelamar diambil 12 orang berdasarkan nilai tertinggi. Pada 4 s.d 5 September 2012, pelamar yang dinyatakan lulus kemudian menjalani tes wawancara.

Berdasarkan hasil tes wawancara, ditetapkan 6 (enam) orang calon, yaitu : Ahdanan, S.Ag., M.Pd., Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Nurhamin, S.Pt., M.H., Roby Afriyan, S.Ag., M.Si., dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I., selanjutnya 6 calon ini diserahkan kepada Bawaslu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.⁴⁶

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan tes terakhir yang diikuti calon anggota Bawaslu Provinsi Riau. Dari hasil tes tersebut, terpilihlah Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau Periode 2012-2017.

Pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu melantik Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau di Jakarta, ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Dengan demikian, pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi Riau secara resmi terbentuk.

Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, ketiga Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau segera melakukan pleno untuk memilih Ketua. Berdasarkan hasil pleno, terpilih Edy Syarifuddin sebagai ketua Bawaslu

⁴⁶ Andis susilawan Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau*, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016), hlm 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Provinsi Riau, yang disepakati akan dilakukan pertukaran ketua massa bakti 2,5 tahun dari Edy Syarifuddin kepada Rusidi Rusdan.

Dihadapan ketiga pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat, bisa dibayangkan dengan kenggotaan yang hanya tiga orang, belum ada kantor dan pegawai sekretariat serta sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya, benar-benar dari nol dan hanya bermodalkan Surat Keputusan dari Bawaslu. Seringkali ketiga pimpinan mengadakan rapat dikantin Pustaka Wilayah Kota Pekanbaru, bahkan didalam mobil anggota Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan untuk menyusun program kerja.

3. Pembentukan Sekretariat

Dengan adanya unsur sekretariat dalam lembaga Badan Pengawas Pemilu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 107 ayat (1), untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan sekretariat Panwascam.

Mengingat hal ini, maka Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Provinsi sebagai personel sekretariat Bawaslu Provinsi Riau kepada Gubernur Riau secara tertulis. Pada pembentuk sekretariat ada beberapa proses yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Riau, antara lain:

- a. Bawaslu Provinsi Riau melakukan audiensi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Demi menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan surat Bawaslu RI Nomor: 594/Bawaslu/VII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 585-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Bawaslu Provinsi Riau.
- b. Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan nama-nama PNS kepada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil dari audiensi yang dilakukan Bawaslu

Provinsi Riau mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada Bawaslu Riau untuk mengusulkan nama Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Pada tanggal 26 September 2012 Bawaslu Riau menyurati Pemerintah Provinsi Riau Nomor 01/Bawaslu-Riau/IX/2012 perihal permohonan sekretariat, pegawai, dan saran kerja.

4.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Riau

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Bawaslu Provinsi Riau (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Tugas

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas :
3. Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten atau kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi ;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi.
4. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 5. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dalam Hal Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Pelanggaran :

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu

Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
2. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
5. Memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Wewenang

1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawah;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tahapan pemilu ditingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Visi dan Misi Bawaslu Riau

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermatabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri yang solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.4 Logo Bawaslu Riau

Gambar 4.1 Logo Bawaslu Riau



4.5 Perbawaslu No.10 Tahun 2019

Perbawaslu merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh bawaslu republik Indonesia yang mengatur segala hal tentang teknis pelaksanaan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Perbawaslu no 10 tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yang berisi 13 Bab dan 40 pasal, dalam perbawaslu no 10 tahun 2019 difokuskan kepada kerja humas di tingkat bawaslu RI sampai bawaslu tingkat kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab satu sampai dengan bab lima, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Humas Bawaslu Riau Dalam Implementasi Perbawaslu No 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik mengupayakan 4 peran yaitu *Communicator* adalah peran humas sebagai pemberi pesan atau informasi. *Relationship* merupakan kemampuan humas Bawaslu Riau dalam membangun hubungan yang baik terhadap publik internal dan publik eksternal di Bawaslu Riau, *Backup management* oleh humas Bawaslu Riau yaitu tugas yang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Riau, *Good image maker* adalah upaya untuk menciptakan citra baik lembaga Bawaslu Riau. Publikasi dilakukan bertujuan untuk membangun citra positif Bawaslu Riau dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang telah dilaksanakan Bawaslu Riau, informasi yang diberikan adalah informasi yang dapat membantu menaikkan reputasi Bawaslu Riau.

Upaya humas Bawaslu Riau dalam implementasi Perbawaslu no.10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah sangat baik, hal ini sejalan dengan prestasi yang di raih oleh Bawaslu Riau sebagai lembaga non structural dengan implementasi keterbukaan informasi terbaik pertama tahun 2019.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang upaya humas Bawaslu Riau dalam Implementasi Perbawaslu No10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada humas Bawaslu Riau diharapkan meningkatkan peran sebagai komunikator dalam menyebarluaskan informasi dengan lebih terencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Humas bawaslu Riau diharapkan meningkatkan Upaya sebagai humas dalam implementasi perbawaslu no.10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga masyarakat merasakan keterbukaan informasi dari Bawaslu Riau tentang program-program pencegahan, pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggoro, 2003. M.L, *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1997 *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta.
- Bandur, Agustinus. 2014. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Degan NVIVO 10*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Cangara, Hafied. 2013. *perencanaan dan strategi komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grasindo.
- Eddy Syarifuddin. 2014. *Dinamika Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Bumi Lancang Kuning*, Pekanbaru.
- Badudu JS dan Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Frazier H More. 2005. *Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irawan Soehartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasali dan Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.J.S. Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Uchjana, Onong. 2004. *Humas Relations dan Public Relations*, Bandung: Mandar Maju.
- Rahmadi F. 1992 *Public Relations Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Frida Kusumastuti. 2004. *Dasar-dasar Humas* , Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Frank Jefkins. 2002. *Public Relations* , Jakarta: Erlangga.
- Suryosubroto B. 2012. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations)* , Jakarta: Rieneka Cipta.
- Jefkins,F. 2004. *Public Relations edisi kelima terj. Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumastutu, Frida. 2004. *Dasar-daar Humas*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Anggoro, M.L. 2003. *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya diIndonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruslan Rosady. 2006. *Manajen Public Relations & media komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Siregar, Sofyan. 2011. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Ndoheba Khenda “Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo” Vol. 19 No.3, Desember 2015

Jurnal Administrasi Perkantoran (JPAP) Emha dan Meylia, “ Membangun Citra SMK Melalui Peran dan Strategi Humas (Studi SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto)”, Vol. 2, No. 2 , 2014.

Jurnal Kom „Sulistyoningsih,”Strategi Humas Dan Protokol terhadap Publikasi Kegiatan DPRD DIY”Vol 10, No. 1, April 2017

Internet:

Wikipedia, dalam:
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum (diakses pada 6 Oktober 2020)

Lampiran:

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI

Wawancara kepada bapak Rusidi Rusdan selaku ketua Bawaslu Riau diwakili oleh bapak angga pratama selaku penanggung jawab media Bawaslu Riau



Wawancara dengan ibuk Dona Donara selaku Kabag Hukum, Humas, dan Data informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Amiruddin Sijaya selaku Kordinator Hukum, Humas, dan Data informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Kannia Mustikawati lahir di Pekanbaru tanggal 31 oktober 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan bapak Budiono dan ibu Yuliani.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-kanak Kartika 1-21 Marpoyan Damai tahun 2004 dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 008 Islam Terpadu Kubang Jaya pada tahun 2005 sampai 2011, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kubang Jaya pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi yaitu di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengambil jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2017 . pada masa studi penulis aktif didalam organisasi jurusan HIMAKOM dan Sanggar Seni Songket. Penulis melakukan kegiatan magang di kantor Bawaslu Riau yang beralamat di jalan Adi Sucipto Pekanbaru. Penulis menyelesaikan masa studi strata satu ini pada tahun 2021 dengan menyandang gelar S.I.Kom.